

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, Desentralisasi sendiri sebenarnya memiliki dua arti utama, yaitu desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan sebagian kekuasaan kepada mereka oleh pemerintah pusat. Desentralisasi juga dapat berarti penyerahan kekuasaan tertentu kepada daerah otonom yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Muslimin (1960) mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan kepada badan-badan dan kelompok-kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Perjalanan pemerintahan Indonesia dimulai dengan jatuhnya pemerintahan pada masa Orde Baru yang berhaluan tengah. Reformasi administrasi akhirnya memunculkan model manajemen desentralisasi. Dalam model ini, semua kegiatan pemerintahan daerah sendiri dilimpahkan kepada daerah otonom, dan daerah memiliki kendali atas semua kegiatan daerah dan melaksanakan kebijakan yang mereka tetapkan sendiri. Perkembangan birokrasi masih memiliki hubungan yang sangat erat antara budaya politik dan masyarakat. Budaya kegiatan politik memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan demokrasi. Dewasa ini, demokratisasi tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh pengembangan budaya aktivitas politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Menanggapi perkembangan kebutuhan akan perubahan, akan sulit untuk menghindari kemungkinan adanya dua sikap yang secara alamiah menentang perubahan yang sedang berlangsung.

Sebagai proses perubahan untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis, perwujudan demokratisasi juga dihadapkan pada dua kutub yang berlawanan, yaitu budaya politik rakyat yang mendukung dan menghambat proses demokratisasi. Budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis. Budaya politik demokrasi adalah seperangkat sistem kepercayaan, perilaku, sikap, cara pandang, dan lainnya yang mendukung tercapainya partisipasi (Almond dan Verba). Budaya politik demokrasi adalah

budaya politik partisipatif, yang Almond dan Verba sebut sebagai budaya sipil. Oleh karena itu, hubungan antara budaya politik dan demokrasi (demokratisasi) tidak dapat dipisahkan dalam konteks budaya sipil. Eksistensi fenomena demokrasi atau tidak dalam budaya politik yang berkembang di masyarakat tidak dapat dilihat hanya dari interaksi individu dalam sistem politik, tetapi juga dari interaksi individu dalam konteks kelompok atau kelompok-kelompok sosial lain. . dan kelompok. Dengan kata lain, budaya politik dapat dilihat dalam manifestasinya dalam hubungan antara masyarakat dan struktur politik dan dalam hubungan antara kelompok dan kelompok dalam masyarakat itu.

Kebijakan pemerintahan mengenai otonomi desa diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada desa untuk dapat lebih mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial, tetapi untuk kewenangan yang luas yang diberikannya juga memerlukan tanggung jawab yang lebih besar di semua tingkat. Komponen untuk pemenuhan prinsip mencapai otonomi dan bukan hanya menciptakan konflik kepentingan pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan. UU Otonomi Desa dapat menjadi pedoman bagi masyarakat desa untuk menciptakan pemerintahan dengan kekuasaan yang lebih demokratis diantara kekuatan-kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan organisasi pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari banyak kejadian, antara lain:

1. Mengurangi dominasi birokrasi pemerintahan dan memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
2. Munculnya semangat demokrasi di masyarakat ditandai dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan besar untuk mengarahkan kinerja kepala desa dan keinginan masyarakat untuk lebih besar. kehidupan masyarakat desa.
3. Partisipasi masyarakat dapat lebih besar karena semua proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintah tingkat desa dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kebijakan pemerintah, sehingga keinginan dan partisipasi masyarakat lebih ditekankan.

Kehidupan birokrasi yang diarahkan atau bahkan didominasi oleh muatan politik jabatan, jelas menunjukkan bahwa tujuan birokrasi melenceng dari tujuan semula. Kepemimpinan birokratis ini sarat dengan aspek politik yang melahirkan arah pelayanan publik yang seharusnya untuk kepentingan rakyat yang menggunakan layanan politik. Namun, perubahan yang sedang berlangsung dalam pelaksanaan birokrasi Indonesia berdampak pada tata kelola politik dan pemerintahan, termasuk pemerintahan lokal dan desa. Salah satu perubahan yang paling signifikan dapat dilihat pada kebijakan desentralisasi dan otonomi saat ini, yang dalam kebijakan ini membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi pemerintahan dan juga dalam perjalanan proses politik. Contoh dari perubahan tersebut adalah pemilihan langsung presiden daerah dan kota, kegiatan pemilihan merupakan salah satu konsekuensi dari desentralisasi politik.

Selain itu, kabupaten dan desa diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengelola daerahnya masing-masing. Dalam keadaan seperti ini perkembangan kondisi dan kehidupan politik meningkat sebagai akibat dari perebutan kepemimpinan dan kekuasaan. Kemenangan mengarah pada proses perebutan kepemimpinan puncak dan kekuasaan, yang berdampak pada kebutuhan sumber daya yang besar, sumber daya manusia dan sumber daya politik, ekonomi dan sosial. Keterbatasan akses dan ketersediaan sumber daya tersebut mengakibatkan munculnya berbagai upaya untuk memperoleh dan menguasai sumber daya yang diperlukan. Upaya yang biasa dilakukan adalah membangun tim sukses dengan peran dan fungsi memenangkan calon. Tim sukses yang dibuat akan menggunakan strategi kemenangan yang berbeda. Salah satunya adalah penggunaan birokrasi dalam sistem pemerintahan. Birokrasi merupakan bagian yang sangat penting dari strategi pemenangan karena merupakan satu-satunya instansi yang menguasai data dan informasi, serta aliran pemerintahan yang paling besar dan paling berdampak langsung kepada masyarakat. Upaya melibatkan sistem pemerintahan dalam persaingan jabatan pimpinan di tingkat desa adalah pemangku kepentingan. Dalam proses pemilu, hal itu juga berkontribusi pada konstelasi politik yang berkembang di daerah. Peningkatan konstelasi politik yang terjadi ini mengakibatkan partisipasi

dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa dan daerah, karena dapat merangsang munculnya aktivitas politisasi birokrasi.

Sejalan dengan kegiatan ini adalah upaya untuk menciptakan lembaga birokrasi sebagai alat kepentingan politik untuk menang dalam rangka memperoleh posisi kepemimpinan yang tinggi di tingkat desa dan kabupaten. Oleh karena itu, tindakan di Indonesia ini biasanya memiliki citra buruk demokrasi di Indonesia, karena dapat dikatakan hampir tidak ada netralitas aparatur pemerintah yang menyebabkan citra buruk birokrasi. Selain masalah-masalah yang muncul pada saat pemilihan, ada masalah lain yang muncul setelah pemilihan kepala desa. Masalah yang sering terjadi di desa dan dapat diperbincangkan adalah politisasi birokrasi aparatur pemerintahan desa. Politisasi birokrasi ini sering terjadi karena kebalikan dari kemenangan kepala desa terpilih menjadi tim sukses mereka, sering menjadi jual beli jabatan pejabat desa atau penunjukan salah satu tim sukses. menjadi pejabat desa sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah berjuang pada pemilu lalu. Sekaligus, aksi ini bertujuan untuk mengendalikan roda pemerintahan, yang bermanfaat, dan juga untuk melanjutkan kepemimpinan pemerintahan saat ini hingga masa pemilu yang akan diadakan di masa depan. Karena itu adalah tanda bahwa pemerintah ini melakukan segala cara untuk terus memimpin.

Di beberapa daerah, sudah banyak terungkap praktik jual beli jabatan untuk mempolitisasi birokrasi pemerintah demi keuntungan pribadi dengan menggunakan kekuasaannya sebagai kepala desa atau kepala daerah. Misalnya, baru-baru ini terjadi penangkapan Bupati Probolingga yang kemarin melakukan praktik jual beli jabatan dalam pemilihan kepala desa saat ini dalam kontestasi pilkada. Ini adalah contoh kasus yang bisa dipublikasikan, padahal kasus serupa sudah berkali-kali terjadi di tingkat pemerintahan yang lebih rendah seperti Organisasi Sarana Daerah atau di tingkat desa. Hal yang sama terjadi pada pemerintah desa Tegalrejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang pada 3 tahun yang lalu ketika dia masih menjabat sebagai mantan kepala desa sebelum kepala desa yang baru terpilih. Ada juga yang aneh dengan pertukaran aparatur desa pada waktu itu, meskipun pertukaran aparatur desa juga memperkenalkan

sistem merit dalam proses pemilihan perangkat di desa akan tetapi prosesnya hanya formalitas untuk menutupi kecurangan untuk mempolitisasi birokrasi agar tidak ketahuan dan keluar. Namun, insiden ini berangsur-angsur mengemuka, meski sejauh ini tanpa konsekuensi karena salah satu peserta yang terlibat dalam pemilihan perangkat desa berani mengangkat isu kecurangan dalam hasil pemilihan pejabat desa diumumkan.

Peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi dan birokrasi pemerintahan kita saat ini sedang dalam kondisi yang buruk karena hal seperti ini terkesan lumrah dan dilakukan berulang-ulang untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Jika hal ini terulang, tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi yang dibangun oleh para pendahulu kita lambat laun akan menjadi nama formalitas penyelenggaraan pemerintahan di masa depan karena merupakan akar permasalahan akibat kegiatan yang tidak segera disingkirkan. Dengan mengacu pada uraian latar belakang di atas maka judul skripsi yang dipilih adalah “Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Desa dengan Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut yang mengangkat tentang permasalahan politisasi birokrasi yang ada pada instansi pemerintahan maka permasalahan ini di fokuskan pada praktik jual beli jabatan sejak pemerintahan desa terpilih pada tahun 2019 hingga saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya jual beli jabatan dalam aparatur pemerintah desa?
2. Apa saja dampak dari jual beli jabatan terhadap birokrasi pemerintahan desa?

1.3 Tujuan

Tujuan dengan adanya penulisan skripsi ini untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi penyebab adanya praktik jual beli jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang masih kerap terjadi berulang kali hingga saat ini serta dampak yang ditimbulkan dari jual beli jabatan terhadap birokrasi pemerintahan desa ini.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang khususnya pengembangan pada bidang ilmu pemerintahan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa masukan atau saran kepada pemerintah desa dalam upaya perbaikan birokrasi dimasa yang akan datang sehingga dapat terbebas dari praktik – praktik politisasi birokrasi pemerintahan

